

RISK REGISTER PADA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
KOTA DENPASAR TAHUN 2026

Baris	Nama OPD	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan DPA 2025	Pagu Anggaran RKA 2026	Risiko																		
					Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Risiko (Uraian)	Skenario Risiko	Kode Risiko	Jenis Risiko froud	Pemilik	Sebab		C/UC	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Status Risiko	Existing Control (Pengendalian yang sudah ada)	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
													Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		14.479.349.448	14.118.355.023																			
	MISI : Menjaga Stabilitas Keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan dan Kesiapsiagaan Bencana																						
	Tujuan : Terwujudnya Stabilitas Keamanan di Kota Denpasar																						
	Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan						Indeks Ketahanan Pangan	Tidak tercapainya target Indeks ketahanan pangan		RSP. 26.08.01.07		- DPKP - DISTAN	-Aspek Ketersediaan pangan rendah	Internal/eksternal	UC	Kebutuhan pangan tidak tercukupi	Masyarakat	2	2	4	rendah	SK Tim Satgas pangan	Melakukan pendataan dan pemantauan stok pangan
													- Aspek keterjangkauan akses pangan tidak memiliki akses penghubung yang memadai	Internal/eksternal	UC	Distribusi pangan terganggu/ tidak lancar	Masyarakat	2	2	4	rendah	- SK Tim Satgas pangan - Kerjasama dengan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Pemantauan distribusi pangan di tingkat produsen dan konsumen
													- Aspek Pemanfaatan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Internal/eksternal	UC	Konsumsi pangan masyarakat tidak beragam	Masyarakat	2	2	4	rendah		Sosialisasi konsumsi pangan yang B2SA(Beragam, Bergizi, Seimbang dan aman)
							Manipulasi data	OPD memanipulasi data target indikator kinerja		RF.26.09.01.07		- DPKP - DISTAN	Ada motif memanipulasi data	Internal	C	data tidak valid	DPKP	1	1	1	Sangat rendah	PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029	Dalam pemasangan indikator dan target selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN		14.479.349.448	14.118.355.023																			
					MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN PRODUKSI PERIKANAN	MENINGKATKAN POLA PANGAN HARAPAN	Skor Pola pangan Harapan Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan tidak sesuai target		RSO.26.09.14.01		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Data pendukung dari OPD yang terkait tidak tepat waktu	Eksternal	C	Target skor PPH ketersediaan tidak tercapai	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadiln gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Melakukan pemantauan dan pendataan ketersediaan pangan
							Skor Pola pangan Harapan Konsumsi	Skor PPH Konsumsi tidak mencapai target		RSO.26.09.14.02		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Kurangnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan	Eksternal	C/UC	Skor PPH Konsumsi tidak tercapai	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadiln gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	sosialisasi untuk konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	326.470.700	190.106.200			Ketersediaan Energi masyarakat(Kkal/ kapita/hari)	Angka Ketersediaan energi tidak mencapai target		ROO.26.09.14.01		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Kurangnya ketersediaan pangan	Eksternal / Internal	C	Angka ketersediaan energi tidak mencapai target	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	3	3	Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memperlancar distribusi pangan sampai ke pelekos desa
							Ketersediaan Protein (Kkal/kapita/hari)	Angka ketersediaan protein tidak mencapai target		ROO.26.09.14.02		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Kurangnya ketersediaan protein nabati dan hewani	Eksternal / Internal	C	Angka ketersediaan protein tidak mencapai target	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	3	3	Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Meningkatkan produksi protein nabati dan hewani serta memperlancar distribusi pangan khususnya protein
							Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)	Angka Kecukupan Energi Tidak mencapai Target		ROO.26.09.14.03		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Kurangnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan	Eksternal / Internal	C	Target skor PPH konsumsi tidak tercapai	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	3	3	Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan mengenal pola konsumsi pangan yang B2SA
							Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	Angka Kecukupan Protein Tidak mencapai Target		ROO.26.09.14.04		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Kurangnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan	Eksternal / Internal	C	Target skor PPH konsumsi tidak tercapai	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	3	3	Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan mengenal pola konsumsi pangan yang B2SA. 2. Memberikan paket buah dan sayur 3. Melaksanakan sosialisasi peningkatan ketahanan pangan keluarga
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa target program yang dipasang pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi target yang dipasang tidak sesuai dengan target pada dokumen perencanaan untuk dapat capaian misalnya menurunkan target)		RF.26.09.14.01	Benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif memanipulasi target	Internal	C	Target tidak sesuai Renstra dan RPJM	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	1	1	Sangat rendah	PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025- 2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
							(Tahap Pertanggungjaw aban) Penyusunan laporan pertanggungjaw aban dengan bukti-bukti capaian yang tidak sesuai	Pejabat benwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawa ban		RF.26.09.14.02	Kerugian keuangan negara				C	Capaian target tidak sesuai data	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar					PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025- 2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	206.164.500	101.286.200			Koefisien Keragaman (CV<15%)	belum optimalnya laporan NBM dan PPH ketersediaan		ROO.26.09.14.05		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Belum optimalnya data ketersediaan pangan dari luar (import) serta data pendukung dari dinas terkait	Eksternal	C	Laporan NBM dan PPH ketersediaan belum bisa digunakan untuk menyusun program kegiatan dengan tepat	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	3	3	rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	melakukan koordinasi dengan OPD terkait serta melaksanakan survey/pemantauan dan monitoring ke penyedia pangan.
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan kegiatan pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan		RF.26.09.14.03	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan ketahanan pangan	1	1	1	Sangat rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA dengan bidang - bidang

		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	326.470.700	190.106.200			Ketersediaan Energi masyarakat(Kkal/ kapita/hari)	Angka Ketersediaan energi tidak mencapai target		ROO.26.09.14.01		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Kurangnya ketersediaan pangan	Eksternal / Internal	C	Angka ketersediaan energi tidak mencapai target	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	3	3	Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Memperlancar distribusi pangan sampai ke pelekos desa
							Ketersediaan Protein (Kkal/kapita/hari)	Angka ketersediaan protein tidak mencapai target		ROO.26.09.14.02		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Kurangnya ketersediaan protein nabati dan hewani	Eksternal / Internal	C	Angka ketersediaan protein tidak mencapai target	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	3	3	Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Meningkatkan produksi protein nabati dan hewani serta memperlancar distribusi pangan khususnya protein
							Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)	Angka Kecukupan Energi Tidak mencapai Target		ROO.26.09.14.03		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Kurangnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan	Eksternal / Internal	C	Target skor PPH konsumsi tidak tercapai	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	3	3	Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan mengenal pola konsumsi pangan yang B2SA
							Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	Angka Kecukupan Protein Tidak mencapai Target		ROO.26.09.14.04		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Kurangnya keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan	Eksternal / Internal	C	Target skor PPH konsumsi tidak tercapai	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	3	3	Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan mengenal pola konsumsi pangan yang B2SA. 2. Memberikan paket buah dan sayur 3. Melaksanakan sosialisasi peningkatan ketahanan pangan keluarga
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa target program yang dipasang pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi target yang dipasang tidak sesuai dengan target pada dokumen perencanaan untuk dapat mencapai capaian misalnya menurunkan target)	RF.26.09.14.01		Benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif memanipulasi target	Internal	C	Target tidak sesuai Renstra dan RPJM	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	1	1	Sangat rendah	PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025- 2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
							(Tahap Pertanggungjaw aban) Penyusunan laporan pertanggungjaw aban dengan bukti-bukti capaian yang tidak sesuai	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di reayasa sebagai bentuk pertanggungjawa ban	RF.26.09.14.02		Kerugian keuangan negara				C	Capaian target tidak sesuai data	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar					PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025- 2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	206.164.500	101.286.200			Koefisien Keragaman (CV<15%)	belum optimalnya laporan NBM dan PPH ketersediaan	ROO.26.09.14.05			Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Belum optimalnya data ketersediaan pangan dari luar (import) serta data pendukung dari dinas terkait	Eksternal	C	Laporan NBM dan PPH ketersediaan belum bisa digunakan untuk menyusun program kegiatan dengan tepat	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	3	3	rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	melakukan koordinasi dengan OPD terkait serta melaksanakan survey/pemantauan dan monitoring ke penyedia pangan.
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan kegiatan pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan	RF.26.09.14.03		benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan ketahanan pangan	1	1	1	Sangat rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA dengan bidang - bidang

		Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan	11.276.500	4.766.000			Peta daerah ketahanan dan kerentanan pangan (dok)	Keterlambatan penyusunan Peta kerawanan pangan		ROO.26.09.14.08		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Keterlambatan data pendukung dari stakeholder terkait	Eksternal	UC	Peta kerawanan paangan terlambat disusun	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	1	1	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadlian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan kegiatan pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan		RF.26.09.14.09	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan ketahanan pangan	1	1	1	rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA dengan bidang - bidang
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti penkeluaran yang tidak benar	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawab		RF.26.09.14.10	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	1. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2. surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal	melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e purchasing
		Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	225.923.500	7.328.000			Jumlah pemantauan daerah rawan pangan (Kecamatan)	cadangan pangan berupa beras dan gabah mempunyai umur teknis pendek, penurunan kualitas cadangan		ROO.26.09.14.09		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	penurunan kualitas cadangan pangan	Eksternal	C	Penyusunan Program dan Kegiatan terkait Cadangan Pangan belum Optimal	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	3	3	Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadlian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	peremajaan cadangan pangan sesuai dengan perjanjian kerja sama
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan kegiatan pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan		RF.26.09.14.11	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan ketahanan pangan	1	1	1	rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA dengan bidang - bidang
							(Tahap pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti penkeluaran yang tidak benar	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawab		RF.26.09.14.12	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	1. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2. surat lembaga	melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e purchasing
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	75.964.162	58.262.750			Persentase Pangan yang aman dikonsumsi	Belum optimalnya Pengawasan Pangan		ROO.26.09.14.10		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang pangan yang aman dikonsumsi	Eksternal	C	Target prosentase Pangan Yang Aman Dikonsumsi tidak tercapai	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadlian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang tata cara penanganan pangan segar yang higienis yang memenuhi standar yang berlaku

							(Tahap Perencanaan) Merekayasa target program yang dipasang pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi target yang dipasang tidak sesuai dengan target pada dokumen perencanaan untuk dapat mencapai misalnya menurunkan target)	RF.26.09.14.13	Benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif memanipulasi target	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	1	1	Sangat rendah	PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti capaian yang tidak sesuai	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.09.14.14	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar			C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar					PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
		Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	75.864.152	58.262.750		Jumlah sosialisasi keamanan pangan	Belum optimalnya sosialisasi keamanan pangan		ROO.26.09.14.11		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Kurangnya penerapan keamanan pangan segar di masyarakat	eksternal	C	Target prosentase Pangan Yang Aman Dikonsumsi tidak tercapai	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadiln gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan keamanan pangan
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan kegiatan pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan	RF.26.09.14.15	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan ketahanan pangan	1	1	1	rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA dengan bidang - bidang
							(Tahap pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.09.14.16	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	1. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog pengadaan barang/jasa pemerintah 2. surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan	melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e purchasing
					MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAN PRODUKSI PERIKANAN	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	Produksi Perikanan tidak memenuhi target	RSO.26.25.14.01		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan	Internal/Eksternal	C/UC	Produksi perikanan tidak tercapai	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	1	1	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadiln gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan yang tersedia
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	438.315.575	295.842.250		Jumlah Produksi tangkap Perikanan (ton)	Produksi Perikanan tangkap tidak memenuhi target		ROO.26.25.14.01		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Sarana dan Prasarana penangkapan ikan masih terbatas dan tradisional	Internal/Eksternal	C/UC	Produksi perikanan tangkap tidak tercapai	Dinas dan masyarakat	1	1	1	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadiln gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penangkapan ikan

							(Tahap Perencanaan) Merekayasa target program yang dipasang pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi target yang dipasang tidak sesuai dengan target pada dokumen perencanaan untuk dapat mencapai capaian misalnya menurunkan target)	RF.26.25.14.01	Benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif memanipulasi target	Internal	C	Target tidak sesuai Renstra dan RPJM	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	1	1	Sangat rendah	PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti capaian yang tidak sesuai	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.25.14.02	Kerugian keuangan negara				C	Capaian target tidak sesuai data	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar					PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam daerah kabupaten/Kota	438.315.575	295.842.250		Jumlah produksi perikanan tangkap laut	Belum optimalnya produksi perikanan tangkap laut		ROO.26.25.14.02		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Keterbatasan nelayan dalam akses teknologi, akses pasar dan akses permodalan 2. Kurangnya pengetahuan nelayan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai standar 3. Kualitas Kelembagaan kelompok rendah	Internal/Eksternal	C/UC	1. Belum optimalnya pemanfaatan akses teknologi, akses pasar dan akses permodalan 2. Penggunaan sarana dan prasarana tidak sesuai standar 3. Produktifitas kelompok menurun	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Masyarakat/ pelaku usaha	1	1	1	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Melaksanakan Pelatihan, Bimtek, dan Sosialisasi 2. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis pemanfaatan sarana dan prasarana penangkapan ikan 3. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan untuk penguatan kelembagaan kelompok
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan kegiatan pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan	RF.26.25.14.03	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan ketahanan pangan	1	1	1	rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA dengan bidang - bidang
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.25.14.04	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	1. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2. surat lembaga kebijakan pengadaan	melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e purchasing
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	745.079.000	463.605.450	MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAN PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton)	Produksi perikanan budidaya belum optimal		ROO.26.25.14.03		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Penguasaan teknologi perikanan budidaya masih rendah	Eksternal	C	Target produksi perikanan budidaya tidak tercapai	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Melaksanakan teknis perikanan budidaya sesuai anjuran, sosialisasi, pelatihan, bimtek, magang, study tiru

							(Tahap Perencanaan) Merekayasa target program yang dipasang pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi target yang dipasang tidak sesuai dengan target pada dokumen perencanaan untuk dapat mencapai capaian misalnya menurunkan target)	RF.26.25.14.05	Benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif memanipulasi target	Internal	C	Target tidak sesuai Renstra dan RPJM	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	1	1	Sangat rendah	PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti capaian yang tidak sesuai	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.25.14.06	Kerugian keuangan negara				C	Capaian target tidak sesuai data	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar					PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	104.271.000	59.170.250		Meningkatnya kompetensi pelaku usaha perikanan	Belum maksimalnya pelaku usaha perikanan budidaya yang melakukan akses IPTEK		ROO.26.25.14.04		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Pelaku usaha perikanan budidaya minim pengetahuan, teknologi dan informasi dibidang perikanan budidaya	Internal/eksternal	C	Terbatasnya akses terhadap fasilitas dan IPTEK perikanan budidaya yang tersedia	Kelompok Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadiln gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Pendampingan dan Sosialisasi Akses IPTEK dan Informasi Perikanan Budidaya
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan kegiatan pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan	RF.26.25.14.07	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan ketahanan pangan	1	1	1	rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA dengan bidang - bidang
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.25.14.08	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	1. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2. surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e purchasing
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	640.808.000	404.435.200		Luasan lahan budidaya perikanan	1. Pemanfaatan potensi lahan budidaya belum optimal		ROO.26.25.14.05		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Kurangnya minat masyarakat untuk memanfaatkan potensi lahan budidaya	Eksternal	C	Target Pemanfaatan potensi lahan budidaya tidak tercapai	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadiln gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan yang tersedia dengan melaksanakan identifikasi lokasi, inventarisasi luasan lahan dan sosialisasi pemanfaatan potensi lahan budidaya perikanan
							2. Pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya belum optimal		ROO.26.25.14.06		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Identifikasi rencana kebutuhan sarana dan prasarana budidaya ikan kurang tepat 2. Identifikasi calon penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan kurang tepat	Internal	C	1. Sarana dan prasarana budidaya tidak sesuai jumlah dan spesifikasi 2. Penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan tidak tepat sasaran	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadiln gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana budidaya 2. Melaksanakan CPCL dan verifikasi calon penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan

							(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan kegiatan pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan	RF.26.25.14.09	Benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan	1	1	1	rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA dengan bidang - bidang
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.25.14.10	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	1. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2. surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyerenggaran katalog elektronik lokal	melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e purchasing
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	350.938.500	342.898.750	MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN DAN PRODUKSI PERIKANAN	MENINGKATNYA PRODUKSI PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Belum optimalnya Angka Konsumsi Ikan	ROO.26.25.14.07		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan belum optimal	Eksternal	C	Target Angka Konsumsi Ikan tidak tercapai	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	Menerapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadlian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Melaksanakan Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa target program yang dipasang pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi target yang dipasang tidak sesuai dengan target pada dokumen perencanaan untuk dapat mencapai capaian misalnya	RF.26.25.14.11	Benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif memanipulasi target	Internal	C	Target tidak sesuai Renstra dan RPJM	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	1	1	Sangat rendah	PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti capaian yang tidak sesuai	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.25.14.12	Kerugian keuangan negara				C	Capaian target tidak sesuai data	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar					PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	225.040.000	226.706.750			Jumlah produk perikanan yang aman dikonsumsi	Belum optimalnya mutu produk perikanan yang beredar di masyarakat	ROO.26.25.14.08		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Belum optimalnya sarana dan prasarana sistem rantai dingin 2. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait penanganan mutu produk sesuai dengan yang dipersyaratkan	Internal/Eksternal	C/UC	1. Penurunan mutu produk hasil perikanan 2. Penanganan mutu produk hasil perikanan yang aman dan higienis tidak optimal	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadlian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pemanfaatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin 2. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan penanganan mutu produk hasil perikanan

							(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan kegiatan pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan	RF.26.25.14.13	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan	1	1	1	rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA dengan bidang - bidang
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.25.14.14	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	1. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2. surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring	melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e purchasing
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.896.500	116.180.000		Jumlah ketersediaan ikan	Ketersediaan ikan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat		ROO.26.25.14.09		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Produksi perikanan tangkap laut rendah 2. Kurangnya aktivitas nelayan dalam melaut	Internal/Eksternal	C/U/C	1. Ketersediaan ikan rendah 2. Produksi perikanan tangkap rendah	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Masyarakat/ pelaku usaha	1	1	1	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadiln gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana penangkapan ikan 2. Pembinaan dan Pendampingan Penangkapan Ikan
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan kegiatan pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan	RF.26.25.14.15	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan ketahanan pangan	1	1	1	rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA dengan bidang - bidang
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.25.14.16	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	1. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2. surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e purchasing
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.305.483.521	12.755.557.623	MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN PRODUKSI PERIKANAN	MENINGKATKAN PRODUKSI PERIKANAN	Persentase pemenuhan penunjang layanan kesekretariatan (%)	1. Perencanaan Anggaran tidak tepat waktu 2. Penyelesaian keuangan tidak tepat waktu 3. laporan aset tidak tepat waktu	ROO.26.25.14.10		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1.Kurang cermat dalam penyusunan perencanaan anggaran 2. Ada keterlambatan laporan dari bidang 3.belum terdapat BAST, laporan mjuatasi aset belum diupdate secara berkala	Internal	C	1.Keterlambatan dalam penyusunan Dokumen perencanaan 2. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan 3. keterlambatan laporan aset	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	2	1	2	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadiln gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	1. Dibuatkan SK penyusunan Dokumen Perencanaan, melakukan koordinasi dengan bidang 2. Melakukan monev setiap bulan terhadap laporan keuangan 3 Monitoring terhadap mjuatasi aset, pencatatan aset-aset baru

							(Tahap Perencanaan) Merekayasa target program yang dipasang pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi target yang dipasang tidak sesuai dengan target pada dokumen perencanaan untuk dapat mencapai capaian misalnya menurunkan target)	RF.26.25.14.17	Benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif memanipulasi target	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	1	1	Sangat rendah	PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti capaian yang tidak sesuai	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.25.14.18	Kerugian keuangan negara				C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar					PERATURAN Daerah Kota Denpasar No 7 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025-2029	Dalam pemasangan indikator dan target program selalu berpedoman pada RPJMD yang berlaku
		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.018.090.221	11.244.384.415		Jumlah pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai (bulan)	Terlambatnya Gaji ASN		ROO.26.25.14.11		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Terlambat dalam menyusun dokumen kelengkapan gaji, honor	Internal	C	ASN lambat menerima gaji, honor, kinerja menurun	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	3	1	3	Renah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadlan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Proses pengamprahan disesuaikan dengan anggaran kas
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan gaji tidak sesuai dengan jumlah pegawai pada saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan	RF.26.25.14.19	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan ketahanan pangan	1	1	1	rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA dengan bidang - bidang
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pen geluran yang tidak benar	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawaban	RF.26.25.14.20	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	1. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 perihal percepatan penyelenggaraan katalog elektronik lokal dan pemanfaatan toko daring	melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e purchasing

		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.937.000	248.728.000			Presentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tidak tepat waktu		ROO.26.25.14.12		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Tidak menyesuaikan dengan Rencana Operasional kegiatan	Internal	C	Peralatan dan perlengkapan kantor tidak tersedia sesuai kebutuhan	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	2	1	2	Sangat Rendah	Peraturan Walikota Denpasar Nomor 6 tahun 2019 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar	Pengadaan peralatan disesuaikan dengan ROK
								(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan tidak sesuai peruntukan saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan	RF.26.25.14.21	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan pangan	1	1	1	rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA sesuai dengan keperluan kantor
								(Tahapan Pertanggungjaw aban) Penyusunan laporan pertanggungjaw aban dengan bukti-bukti pen geluaran yang tidak benar	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawa ban	RF.26.25.14.22	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	1. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2. surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 16578/KA/07/2022 tanggal 14 juli 2022 perihal percepatan	melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e purchasing
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	226.773.100	75.092.000			Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang daerah pemerintah daerah (unit)	adanya ketidaksesuaian spesifikasi barang dengan surat pesanan		ROO.26.25.14.13		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	kurangnya pengecekan spesifikasi barang saat penerimaan barang	Internal/eksternal	C/UC	Barang kantor tidak sesuai dengan kebutuhan pemakaian kerja	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	2	1	2	Sangat Rendah	- Memberikan sosialisasi tentang pemahaman antikorupsi - Peraturan Walikota Nomor 6 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Denpasar	Pengecekan barang pesanan saat datang dilakukan oleh pegawai pengelola barang milik negara dan pejabat pengadaan barang dan jasa.
								(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan tidak sesuai dengan RKBM saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian kegiatan	RF.26.25.14.23	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan ketahanan pangan	1	1	1	rendah	Kebijakan dalam penyusunan anggaran dan kegiatan pada pemerintah Kota Denpasar	Melakukan Desk RKA sesuai dengan yang sudah tercantum pada RKBM
								(Tahap Pelaksanaan) Adanya ketidaksesuaian spesifikasi barang datang dengan surat pemesanan	Adanya kemungkinan rekanan dengan pegawai pengadaan barang jasa melakukan kecurangan saat melakukan kesepakatan pengadaan barang dan jasa	RF.26.25.14.24	Perbuatan curang	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	kurangnya pengecekan spesifikasi barang saat penerimaan barang	Internal/eksternal	C/UC	Barang kantor tidak sesuai dengan kebutuhan pemakaian kerja	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	2	1	2	Sangat Rendah	- Memberikan sosialisasi tentang pemahaman antikorupsi - Peraturan Walikota Nomor 6 tentang pengadilan gratifikasi di lingkungan pemerintah Kota Denpasar	Pengecekan barang pesanan saat datang dilakukan oleh pegawai pengelola barang milik negara dan pejabat pengadaan barang dan jasa.

							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan / BAST tidak sesuai dengan spesifikasi barang	Pejabat / pegawai bersangkutan memberikan bukti - bukti yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang diadakan	RF.26.25.14.25	Perbuatan curang	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Lemahnya pengawasan	Internal	C	Berpotensi terdapat kerugian uang negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1	1	1		Pengawasan secara berkala	Reviu intern secara berjenjang atas setiap proses pengadaan barang
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.370.425.200	786.521.208		Presentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (%)	Terlambatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		ROO.26.25.14.14		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Terlambatnya kelengkapan dokumen Gaji Non ASN	Internal	C	Terlambatnya penerimaan gaji Non ASN	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	3	1	3	Rendah	SOP Nomor 523/1214/DPKP tentang SOP Penyusunan SPP LSI/UPIGU	Menyesuaikan dengan ROK
							(Tahap Perencanaan) Merekayasa usulan gaji Non ASN tidak sesuai jumlah pegawai saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian jumlah pegawai non asn	RF.26.25.14.26	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan ketahanan pangan	1	1	1	rendah	-SE Walikota Denpasar Nomor 900/3042 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKA PD -Adanya undang undang tentang tindakan pemberantasan korupsi	Melakukan Desk RKA sesuai dengan jumlah pegawai non asn yang ada
							(Tahap Pertanggungjawaban) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawab	RF.26.25.14.27	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	1. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2. surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah	melakukan pembelian dengan menggunakan sistem e purchasing
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.258.000	400.832.000		Jumlah barang milik daerah yang terawat (unit)	Banyak kerusakan barang milik daerah		ROO.26.25.14.15		Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Pemeliharaan aset milik daerah belum optimal	Internal	C	Barang milik daerah banyak yang rusak	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	3	1	3	Rendah	SOP Nomor 523/1142/DPKP tentang SOP Pemeliharaan sarana dan prasarana	Perlu pendataan aset milik daerah yang perlu dirawat
							(Tahap Perencanaan) Membuat usulan perawatan untuk barang yang tidak masuk dalam RKBMD saat penyusunan RKA	Pejabat memanipulasi usulan uraian pemeliharaan barang tidak sesuai RKPBM	RF.26.25.14.28	benturan kepentingan	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	Ada motif mendapatkan keuntungan	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan ketahanan pangan	1	1	1	rendah	-SE Walikota Denpasar Nomor 900/3042 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan RKA PD -Adanya undang undang tentang tindakan pemberantasan korupsi	Melakukan Desk RKA sesuai dengan barang yang termasuk dalam daftar RKPBM

								(Tahap Pertanggungjaw aban) Penyusunan laporan pertanggungjaw aban dengan bukti-bukti pen geluaran yang tidak benar	Pejabat berwenang memberikan bukti-bukti yang sudah di rekayasa sebagai bentuk pertanggungjawa ban	RF.26.25.14.29	Kerugian keuangan negara	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar	1. Lemahnya Pengawasan 2. Lemah verifikasi bukti untuk pelaporan 3. Untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	Berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar dan Masyarakat	1	2	2	Sangat Rendah	1. Peraturan Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah no 9 tahun 2021 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah 2. surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor	melakukan pembelanjaan dengan menggunakan sistem e purchasing
		TOTAL	14.479.349.448	14.118.355.023																			

- Sasaran Pemda (RSP)
- Sasaran OPD (RSO)
- ROO Program
- ROO Kegiatan
- RF

